Dinamika Perburuhan Indonesia dalam Tiga Tahun Terakhir (2003-2005)

Oleh Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS)

Pengantar

Harus diakui pertumbuhan ekonomi makro Indonesia sepanjang tiga tahun terakhir, 2003-2005, tidak begitu menggembirakan. Sektor riil (termasuk industri-industri padat karya) pun pertumbuhannya kian menurun. Perekonomian Indonesia di sana-sini masih tampak tambal-sulam: nilai tukar rupiah yang fluktuatif, anggaran belanja negara yang defisit, inflasi yang sudah mencapai belasan persen, dan sederet fakta yang panjang untuk disebutkan. Lihat misalnya kenyataan maraknya PHK (pemutusan hubungan kerja) yang terjadi di berbagai sektor industri. Belum lagi implikasi selanjutnya bagi pemerintah yang mengeluarkan kebijakan pencabutan subsidi dan menaikkan harga bahan kebutuhan dasar. Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah berkali-kali naik, pun tarif dasar listrik. Kenaikan harga kebutuhan dasar dan pencabutan subisidi pasti tak akan selesai sampai di sini.

Kondisi perekonomian yang buruk biasanya berdampak pada gejolak perselisihan perburuhan. Celakanya, fenomena ini diperparah dengan kenyataan bahwa puluhan juta rakyat Indonesia masih akan tetap menganggur dalam 10 tahun ke depan. Ini berarti perekonomian pada sepuluh tahun ke depan masih dalam tingkat yang suram. Ekonomi nasional diperkirakan belum mampu menyerap pengangguran dan angkatan kerja baru. Komisi Sosial Ekonomi PBB untuk Asia Pasifik (ESCEP) mengestimasikan perekonomian Indonesia membutuhkan waktu sepuluh tahun untuk kembali tumbuh ke tingkat 7 persen per tahun.

Pada tulisan ini akan dipaparkan sekilas kondisi ekonomi dan peta perburuhan sepanjang 2003-2005. Selain itu, ada beberapa topik yang mendapat perhatian khusus: buruh tekstil dan garmen; serta buruh sektor informal. Setelah kemudian mengidentifikasi masalah perburuhan, tulisan ditutup dengan beberapa catatan tentang tantangan perburuhan ke depan.

Kemiskinan, Pengangguran, PHK

Sejak krisis ekonomi 1997/98, kondisi perekonomian Indonesia relatif belum membaik dan terus diiringi dengan meroketnya angka pengangguran terbesar sepanjang sejarah. Masalah pengangguran akan terus menjadi batu sandungan perkembangan sosial-ekonomi negeri ini di masa-masa mendatang. Selain itu, beban pembayaran utang luar negeri pemerintah juga sudah di luar batas kemampuan. Negeri ini terjerat utang yang terus dikucurkan oleh lembaga-lembaga donor internasional dan negara-negara maju.

Terhitung sejak tahun 1980 sampai saat ini Indonesia sudah membayar utang luar negeri pemerintah tidak kurang dari 125 milyar dolar AS. Jumlah ini tidak termasuk utang swasta. Pemerintah juga masih mempunyai sisa utang yang harus dibayar tidak kurang dari 70 milyar dolar AS. Karenanya, setiap tahun pemerintah harus menguras perolehan devisa sedikitnya 8 hingga 9 milyar dolar AS untuk membayar cicilan pokok dan bunganya. Tak dapat dibayangkan hingga kapan Indonesia terbebas dari beban utang yang masing-masing dari 227,1 juta pendududuknya menanggung Rp.7 juta per kepala.

Beban utang luar negeri di atas membuat format Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak pernah mampu mendanai masalah-masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan yang sebagian besar diderita para buruh di berbagai sektor. APBN 2005 mengalokasikan Rp.64 triliun untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri, sementara biaya untuk sektor penunjang pembangunan kualitas manusia tidak lebih dari 1,5 persen (Rp 7,4 triliun sektor kesehatan, Rp 21,5 triliun pendidikan, dan Rp 3,679 triliun untuk sektor pertanian).

Sejak tahun 1999, angka penduduk miskin cenderung konstan, tak ada perbaikan. Jumlahnya hingga tahun 2004 masih mencapai 36,1 juta, lebih banyak dari tahun 1996 yang hanya 34,5 juta. Sekitar 2/3 dari jumlah penduduk miskin tersebut terdapat di pedesaan (lihat Tabel 1).

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Desa dan di Kota, 1996-2004

Tahun	Kota		Desa		Kota + Desa	
	Jumlah	% terhadap Penduduk Kota	Jumlah	% terhadap Penduduk Desa	Jumlah	% terhadap Total Penduduk
1996	9.6	13.6	24.9	19.9	34.5	17.7
1998	17.6	21.9	31.9	25.7	49.5	24.2
1999	12.4	15.1	25.1	20.2	37.5	18.2
2000	12.3	14.6	26.4	22.4	38.7	19.1
2001	8.6	9.79	29.3	24.8	37.9	18.4
2002	13.3	14.5	25.1	21.1	38.4	18.2
2003	12.3	13.6	25.1	20.2	37.4	17.4
2004	11.3	12.1	24.8	20.1	36.1	16.7

Sumber: Statistik Indonesia , BPS

Sejumlah kesepakatan Indonesia dengan Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memaksa negeri ini menjalankan kebijakan pencabutan subsidi layanan publik, membuka pasar bagi produk impor, dan kebijakan fiskal yang mengabaikan hak-hak ekonomi rakyat. Parlemen dipaksa memproduksi peraturan yang memperlancar privatisasi (UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan lainnya), serta kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hukum dan aturan perburuhan juga dituntut mengadopsi konsep kelenturan pasar tenaga kerja (*labour market flexibility*) yang melayani investor tetapi mengabaikan kesejahteraan buruh. Akibatnya, buruh selalu berada dalam ancaman PHK dengan tingkat eksploitasi yang kian meningkat.

Dalam catatan Biro Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja di Indonesia hingga Februari 2005 mencapai 105,8 juta orang, bertambah 1,8 juta orang dibanding Agustus 2004. Jumlah penduduk yang bekerja dalam periode yang sama hanya bertambah 1,2 juta orang, yang itu berarti telah muncul penganggur baru sebesar 600 ribu orang. Harus dicatat bahwa angka pengangguran di atas adalah angka konservatif dan jumlah riil mungkin lebih besar dengan asumsi bahwa sederet data menyebutkan angkatan kerja baru saja muncul 2,5 juta orang setiap tahunnya.

BPS juga mencatat bahwa pada Februari 2005 tingkat pengangguran terbuka mencapai 10,3 persen (10,9 juta orang), lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2004 sebesar 9,9 persen (10.3 juta orang). Jumlah penduduk yang bekerja tidak penuh (pengangguran tertutup) pada Februari 2005 mencapai 29,6 juta orang atau 31,2 persen dari seluruh penduduk yang bekerja, lebih tinggi dari keadaan Agustus 2004 sebesar 29,8 persen (lihat Tabel 2).

Melimpahnya jumlah pengangguran diiringi pula dengan frekuensi PHK yang terjadi di beberapa sektor penting. Dalam grafik 1 terlihat bahwa dalam periode Januari hingga Juni 2005, misalnya, buruh industri kehutanan dan perkebunan adalah yang terbesar terkena PHK (83 persen), disusul mereka yang bekerja di industri tekstil, sandang dan kulit (14 persen). Buruh di sektor perdagangan umum dan jasa, logam, elektronik dan mesin, serta transportasi masing-masing ter-PHK sebanyak satu persen dari total kejadian PHK selama semester I tahun 2005 ini. Menurunnya daya produksi dan kebijakan yang kontraproduktif bagi pengusaha adalah yang kerap kali menjadi alasan para pengusaha di industri kehutanan dan perkebunan – juga di industri tekstil, sandang dan kulit – untuk mem-PHK buruh.

Tabel 2
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan Utama
Agustus 2004 dan Februari 2005
(Dalam Jutaan)

RINCIAN	Agust-2004	Feb-2005
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (juta)	153.9	155.5
Angkatan Kerja (juta)	104,0	105.8
a. Bekerja	93.7	94.9

b. Penganggur Terbuka	10.3	10.9
Bekerja Tidak Penuh (pengangguran terututp, juta)	27.9	29.6
a. Pengangguran tertutup sukarela (*voluntary*)	14.5	15.3
b. Pengangguran tertutup tanpa sengaja (*unvoluntary*)	13.4	14.3
Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, mengurus rumah tangga, lainnya)	49.9	49.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, (%)	67.6	68,0
Tingkat Pengangguran Terbuka, (%)	9.9	10.3
Tingkat Pengangguran Tertutup, (%)	29.8	31.2

Sumber: BPS

Grafik 1
Frekuensi PHK Bulan Januari – Juni 2005
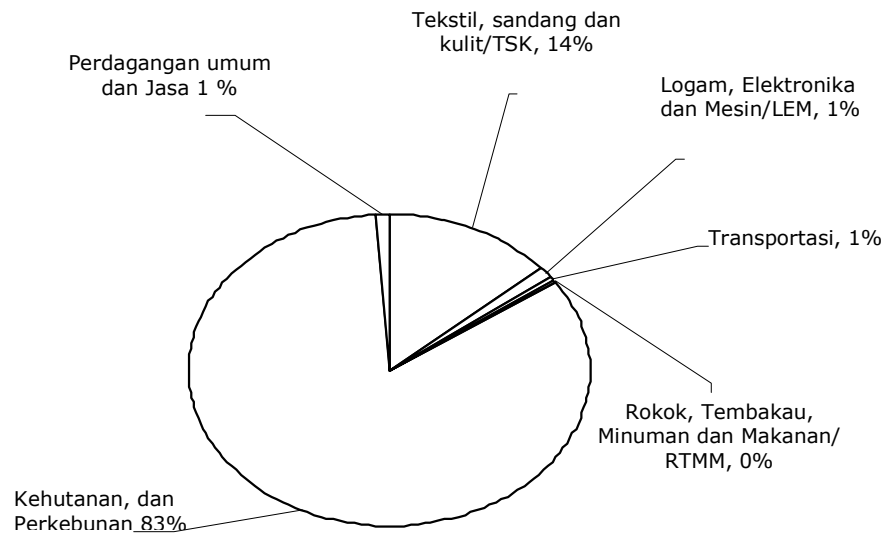
Sumber : Kliping berita perburuhan, diolah oleh LIPS

Daftar perusahaan yang melakukan PHK terhadap sejumlah buruh makin panjang dalam setahun terakhir. Beberapa di antaranya sebetulnya sudah melakukannya sebagai efek berbagai faktor. Tapi kenaikan harga bahan bakar minyak, pada awal Oktober lalu, mempercepat proses perampingan itu dan menambah banyak buruh yang diberhentikan.

Harus diakui bahwa hingga saat ini industri di Indonesia masih mengandalkan produk bernilai tambah rendah yang dihasilkan industri padat buruh dengan tingkat keahlian dan teknologi yang juga rendah, yang antara lain tercermin dalam potret suram industri kayu, tekstil, garmen, kulit, makanan, minuman dan barang-barang elektronik sederhana berupa komponen. Daya saing yang rendah sering kali diklaim pengusaha akibat kenaikan upah yang terus dituntut buruh, padahal sumber-sumber lain yang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi, termasuk prosedur dan biaya birokrasi yang tidak sedikit, menyumbang secara berarti atas rendahnya daya saing produk manufaktur Indonesia.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pun secara keseluruhan mengalami penurunan. Sampai triwulan ketiga 2003, industri manufaktur hanya tumbuh 2,3 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan sepanjang 2002 (4,1 persen). Di sisi penyerapan buruh juga terjadi demikian, tahun 2002 penyerapannya hanya 0,2 persen, jauh lebih rendah dibandingkan penyerapan pada 2001 (3,8 persen).

Upah riil Menurun

Kenaikan harga BBM pada Februari 2005 dan Oktober di tahun yang sama menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat, menurunkan daya beli para buruh yang baru saja menuntut kenaikan upah yang tak seberapa. Data di bawah ini menunjukkan bahwa upah riil buruh industri (total) dari triwulan I 2004 sampai triwulan I 2005 cenderung menurun. Pada triwulan I 2005 upah buruh industri

(total) mengalami penurunan, baik terhadap triwulan sebelumnya maupun terhadap triwulan yang sama tahun 2004. Ini tentu menegaskan fakta penurunan daya beli buruh industri. Trend penurunan upah riil terjadi di semua jenis industri kecuali industri rokok. Pada industri batubara dan ubin, baik upah nominal maupun upah riil keduanya cenderung menurun (lihat Tabel 3).

Tabel 3

RINCIAN		**TW 1 2004**	**TW 2 2004**	**TW 3 2004 *)**	**TW4 2004 *)**	**TW 1 2005 **)**
Industri (Total)	*Nominal*	819,121	860,329	818,502	855,648	879,001
	Riil	283,725	289,244	273,787	279,203	277,980
Industri Rokok	*Nominal*	505,807	491,296	508,092	509,396	598,020
	Riil	164,811	165,175	169,955	166,219	189,121
Industri Garmen	*Nominal*	780,873	797,196	791,355	847,268	818,135
	Riil	275,881	268,019	264,706	276,469	258,731
Industri Batubara, Ubin	*Nominal*	488,605	526,458	422,407	421,198	417,515
	Riil	161,553	176,996	141,294	137,440	132,037

Sumber: BPS
*Ket: TW = Triwulan; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara*

Di lain pihak, ternyata terdapat kecenderungan bahwa trend peningkatan upah buruh tani lebih lambat dibandingkan trend peningkatan upah di sektor manufaktur, sehingga kemiskinan di pedesaan cenderung lebih banyak dibandingkan di perkotaan, seperti tampak dalam Tabel 1 di atas. Rendahnya upah tersebut memicu peningkatan angka putus sekolah, yang oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional pada periode 2004/2005 diproyeksikan mencapai 1.122.742 anak pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Menengah dan Tingkat Atas. Jumlah anak putus sekolah terbesar di tingkat SD, yakni 685.967 anak.

Di sektor formal, kesempatan kerja dalam lima tahun terakhir ini terlihat cenderung menciut dengan perbedaan upah yang kian lebar antara lapangan kerja formal dan informal. Industri manufaktur (pengolahan) pun produktivitasnya menurun. Sebetulnya, sektor manufaktur belum mampu menyerap tenaga kerja secara lebih banyak dari pedesaan (pertanian), sehingga penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian masih relatif besar. Maka salah satu solusi sebetulnya ialah dengan melakukan pembangunan pertanian dan pedesaan, karena sekitar 65 persen penduduk Indonesia berada di pedesaan; sekitar 44 persen angkatan kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas); sekitar 16 persen PDB nasional berasal dari sektor pertanian; dan kajian-kajian ekonomi menyimpulkan bahwa produk-produk pertanian memiliki efek memicu (*multiplier effects*) dan keterkaitan *(forward and backward linkages)* yang tinggi dengan sektor-sektor lain.

Kendati demikian, alokasi dana dari pemerintah bagi sektor pertanian masih relatif kecil: rata-rata rasio pengeluaran tersebut terhadap PDB sekitar 0,3 persen, sementara sumbangan *output* sektor pertanian ini terhadap PDB mencapai sekitar 16,3 persen. Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pertanian/agraria relatif rendah, bahkan cenderung 'membunuh' sektor ini dan pada saat yang sama menggencarkan industrialisasi di sektor lainnya. Trend ini memang terjadi secara merata di negeri-negeri ASEAN lain akibat desakan globalisasi ekonomi dengan hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional yang merangsek. Perusahaan-perusahaan multinasional ini menuntut iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menekan negara agar membatasi arena yang tersedia bagi buruh yang terorganisasi.

Resistensi Organisasi Buruh dalam Peristiwa Aksi

Semakin menghilangnya proteksi terhadap industri nasional yang menggelembungkan jumlah kebangkrutan industri dan pengangguran, baik karena PHK maupun karena menyempitnya lapangan kerja di sektor formal, memberikan suasana politik yang tetap kondusif bagi bangkitnya gerakan buruh.

Sementara ini mempertahankan politik upah rendah dan mendorong fleksibilitas perburuhan sebagai upaya untuk menggairahkan dunia industri adalah jawaban yang secara politik kerap diucapkan pemerintah. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat itu Aburizal Bakri,

sebulan setelah dilantik menjadi anggota Kabinet Indonesia Bersatu menyatakan hendak merombak berbagai aturan yang terkait dengan investasi, termasuk di dalamnya aturan perburuhan.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang disusun tim Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang kala itu dipimpin Sri Mulyani, secara eksplisit menyatakan hendak mendorong penerapan sistem perburuhan fleksibel sebagai jalan untuk memecahkan persoalan pengangguran yang menjulang. Bagi buruh, dengan melongok pada kenyataan yang terjadi di lapangan, jawaban politik ini sama dengan menekan upah mereka supaya tetap rendah, memudahkan pengusaha untuk menyewa dan memecat (*hire and fire*), dan mencabut jaminan politik atas kelangsungan kepentingan produksi mereka. Dengan demikian, jawaban yang diajukan pemerintah memperjelas watak dan karakter pemerintah yang berkuasa melalui pemilu langsung 2004 tersebut, sebagai pemerintahan yang anti-buruh.

Dinamika aksi buruh sejak 1999 hingga 2005 terjadi dengan rima yang fluktuatif (lihat grafik 2) dan memang secara kasat mata aksi-aksi tersebut belum secara signifikan dapat mempengaruhi kehidupan politik secara nasional. Tetapi aksi-aksi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pada setiap masalah yang dihadapinya, buruh selalu menunjukkan resistensinya. Dalam grafik 2 ditunjukkan perbandingan aksi yang dilakukan buruh sejak 1999. Dibandingkan dengan yang terjadi di tahun 2003, resistensi buruh selama 2004 mengalami peningkatan yang cukup tajam baik dari jumlah aksi maupun keterlibatan buruhnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan yang terjadi pada tahun 2002, frekuensi aksi pada 2004 menurun tipis, namun keterlibatan buruhnya meningkat hingga 30 ribu lebih. Dibanding tahun 2004, aksi pada 2005 meningkat baik dalam frekuensi (meningkat 44 kali) maupun keterlibatan buruh dalam aksi (meningkat lebih dari 44 ribu buruh). Selama 1999-2005 aksi buruh terbanyak terjadi pada tahun 2001 (357 aksi), sementara keterlibatan buruh dalam aksi terbanyak pada tahun 2000 (730.922 buruh).

Grafik 2
AKSI BURUH (1999-2005)
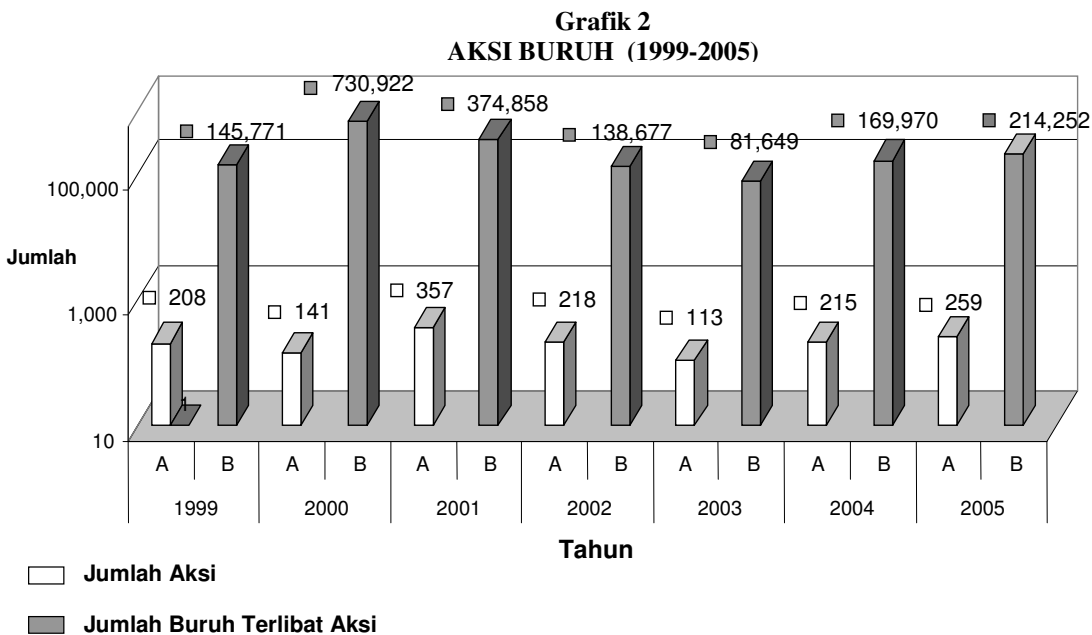
Sumber : Kliping berita perburuhan, diolah oleh LIPS

Perhatian pemerintah yang lebih besar memang tertuju pada gerakan penolakan kenaikan harga BBM. Momentum kenaikan harga BBM memang kerap memicu naiknya keresahan sosial dan mendorong gerakan massa secara luas. Kalangan yang paling terjepit oleh isu ini adalah sektor transportasi. Namun efek kenaikan ini memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan dan secara konsisten menekan pendapatan karena memicu inflasi. Meskipun secara politik paling terkena dampak kenaikan BBM, namun gerakan buruh sektor transportasi sepertinya masih belum beranjak secara kualitatif. Di berbagai daerah, fokus isu atas kenaikan ini masih berkisar pada penyesuaian tarif yang sebenarnya tidak populer di kalangan lain yang justru menuntut pencabutan kebijakan kenaikan BBM. Padahal tuntutan penyesuaian tarif yang notabene menaikan harga transportasi kerap memicu kontradiksi di sesama buruh sektor transportasi. Meski demikian tidak semua kalangan di sektor ini menyuarakan tuntutan penyesuaian tarif. Paling tidak, gerakan buruh transportasi di kota Palembang menyuarakan tuntutan menolak kenaikan harga BBM.

Aksi menentang kenaikan harga BBM juga dilakukan aliansi buruh lintas sektoral di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Batam, Tangerang. Di antara kelompok buruh yang berdemonstrasi, ada juga yang mengangkat isu perempuan yang menegaskan bahwa kebijakan pemerintah yang anti-buruh sangat berdampak serius pada perempuan yang dalam kondisi saat ini dapat memicu tingginya angka kriminalitas dan kekerasan atas kelompok perempuan. Aksi ini dilaksanakan terkait dengan peringatan Hari Perempuan Pekerja se-Dunia yang jatuh pada tanggal 8 Maret 2005 dan isu kenaikan harga BBM.

Melalui berbagai aksi, indikasi menguatnya kesadaran politik di kalangan buruh, mulai tampak signifikan. Kesadaran untuk bersatu dan membangun kerjasama politik bersama elemen-elemen demokratis di dalam negeri mulai terlihat cukup berarti. Tuntutan-tuntutan buruh pun mulai di sampaikan oleh elemen-elemen gerakan non-buruh, seperti gerakan tani, pemuda dan mahasiswa, serta gerakan perempuan. Perayaan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei dalam beberapa tahun terakhir juga tidak hanya diperingati dan diikuti oleh buruh. Hal ini ditunjukkan dari isu yang disampaikannya tidak melulu isu-isu perburuhan. Kami mencatat, di beberapa kota, gerakan aksi satu Mei (*Mayday*) membawa isu-isu seperti pembaruan agraria, pendidikan murah, kesetaraan dan keadilan bagi perempuan, lapangan kerja, industrialisasi nasional, dan tentu saja isu-isu perburuhan seperti kenaikan upah, menolak PHK dan sistem kerja kontrak, menuntut jaminan sosial, dan lain-lain.

Hanya saja, tingkat penindasan yang sangat tinggi, yang memaksa buruh-buruh untuk bekerja lebih lama dengan upah yang lebih rendah, masih menjadi hambatan bagi buruh untuk tampil merespon setiap politik pemerintah, baik yang terkait dengan masalah perburuhan itu sendiri maupun masalah-masalah sosial lainnya. Selain itu, kreativitas dalam mengolah isu dan menampilkannya dalam aksi-aksi yang simultan juga masih mengalami kendala. Situasi yang secara umum dihadapi berbagai serikat buruh adalah sulitnya melakukan konsolidasi politik di internal masing-masing akibat tingginya intensitas reorganisasi struktur produksi di tingkat basis yang paling rendah (pabrik).

Selain tuntutan kenaikan upah yang layak yang memicu aksi para buruh secara umum, PHK juga menjadi isu yang banyak memicu aksi. Pada semester II 2004 lalu, misalnya. Grafik 3 berikut ini secara berurutan menunjukkan masalah PHK (*kategori hubungan kerja*) menempati angka tertinggi dalam daftar tuntutan dan protes buruh selama aksi, disusul tuntutan atas upah/tunjangan (*kategori kesejahteraan*) yang kerap tidak atau lambat diterima buruh. Di urutan ketiga, aksi dipicu oleh uang jaminan sosial yang sering tidak disetorkan pengusaha (biasanya pengusaha menggelapkan uang jaminan sosial tersebut). Sistem kerja dan status kerja (kontrak dan *outsourcing*) masing-masing menempati penyebab keempat dan kelima yang memicu aksi buruh. Sedangkan Undang-Undang perburuhan yang baru (UU No.13/2003, UU No.2/2004) serta pelanggaran kebebasan berserikat (*kategori hak politik*) masih kerap memicu aksi buruh, disamping intimidasi dan tekanan kepada mereka yang mencoba membangun dan melakukan kegiatan berserikat.

Grafik 3
Tuntutan dan Pemicu Aksi Buruh (Juli-Desember 2004)

Fasilitas 2%
Kebebasan Berserikat 2%
Lain-lain 2%
THR/Bonus 2%
Intimidasi 3%
PHK 32%
Menolak Undang-undang 3%
Cuti 4%
Sistem Kerja 5%
Upah/Tunjangan 27%
Jaminan Sosial 12%
Status Kerja 6%
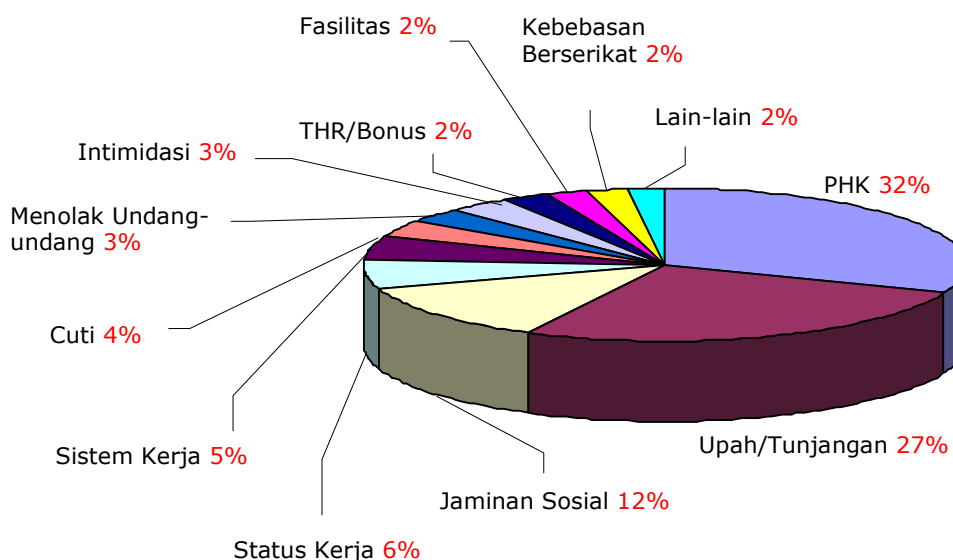
Sumber: Kliping berita perburuhan, diolah oleh LIPS

Dari Globalisasi ke Informalisasi: Buruh Garmen-Tekstil dan Buruh Sektor Informal

Di sini akan diurai secara singkat masalah yang dihadapi buruh garmen dan tekstil, serta buruh sektor informal. Globalisasi bagaimanapun telah juga membawa dampak buruk bagi buruh dan telah mengancam hilangnya apa yang telah menjadi kompromi pada abad lalu antara buruh dan modal: konsep ekonomi kesejahteraan (*welfare economics*).

Satu ciri paling penting globalisasi ekonomi yang menjadi kecenderungan dunia saat ini ialah tumbuhnya kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional (Multinational Corporations/MNCs). Mereka adalah organisasi bisnis yang melakukan operasi di lebih dari satu negara. Perusahaan-perusahaan multinasional sekarang ini telah mendominasi perdagangan hampir semua komoditas penting dunia, termasuk Tekstil dan Produk Tekstil (TPT).

Beberapa eksemplar perusahaan multinasional yang dikenal ialah General Motors dan Ford di industri otomotif; Esso, Shell, British Petroleum di industri minyak; McDonald di rantai makanan cepat saji; AT&T dan International News Corporation di sektor komunikasi; dan bank-bank utama Jepang yang sekitar 23 banknya merupakan 50 bank terbesar di dunia (Heywood,1997).

Buruh Tekstil & Garmen Pasca-2004

Di industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), GAP, Nike dan Adidas dapat disebutkan dalam deretan daftar perusahaan multinasional, selain Phillips-Van Heusen Corp. yang bersama para perusahaan pembeli (*buyer*) TPT lain telah memindahkan konsentrasi bisnisnya ke Cina belum lama ini. Saat ini Cina merupakan salah satu negara yang menjadi ladang subur bagi perusahaan multinasional mengoperasikan bisnisnya.

Signifikansi perusahaan-perusahaan multinasional ialah bahwa mereka mewakili satu konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan aktor-aktor non-negara. Mereka adalah sekelompok kecil konglomerat dengan kekayaan melebihi seluruh harta rakyat Afrika. Hanya dengan sekitar 200 perusahaan multinasional, mereka menguasai seperempat perekonomian dunia.

Tak mengherankan jika perusahaan-perusahaan multinasional dewasa ini mampu mebelanjakan sejumlah uangnya jauh melebihi anggaran belanja suatu negara seperti Indonesia. Mereka juga bisa mengeluarkan jutaan dolar hanya untuk membayar seorang bintang iklan, seperti Nike kepada Tiger Woods yang bayarannya melebihi total upah seluruh buruh yang membuat produk Nike di Indonesia!

Bagaimanapun, aset perusahaan multinasional yang sangat besar itu diperoleh dari eksploitasi atas buruh. Nike, misalnya, telah terbukti melakukan pelanggaran hak-hak buruhnya di Indonesia, Vietnam dan Cina (Anya Schiffrin et.al, 2004). Namun, perusahaan multinasional itu dapat dengan mudah hengkang ke negara lain. Di Indonesia Nike masih menyisakan persoalan bagi para buruh yang ditinggalkannya.

Hengkangnya Nike berlanjut dengan tutupnya banyak pabrik TPT lain, disusul dengan demonstrasi buruh yang kian marak terjadi. Sejak lima tahun terakhir angka demonstrasi buruh di industri TPT selalu yang tertinggi dibanding sektor-sektor lain. Di kota-kota yang menjadi basis industri TPT, diantaranya Jawa Barat dan DKI Jakarta, pada semester pertama 2004 telah terjadi sekitar 40 aksi demonstrasi yang melibatkan tak kurang dari 39 ribu buruh (Sedane, Th.II/No.2, 2004). Hingga saat ini, secara keseluruhan demonstrasi buruh selalu didominasi buruh industri TPT.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) sejak beberapa tahun lalu sudah mulai berteriak jika industri TPT harus segera diselamatkan. Menurut laporan mereka, sekitar separuh dari 2.760 perusahaan TPT di Indonesia akan bangkrut. Pemerintah juga melaporkan bahwa pada tahun 2002 saja sebanyak 242 perusahaan TPT telah gulung tikar dan berdampak sekitar 19 ribu buruh terkena PHK. Hingga sekarang angka ini terus membengkak.

Tentu ini merupakan malapetaka bagi industri yang sempat mampu menyerap hingga dua juta buruh ini. Sayang memang, industri TPT Indonesia terlalu bergantung pada jatah kuota yang diberikan negara-negara maju (AS, Eropa, Kanada). API mencatat bahwa ekspor TPT Indonesia ke negara kuota pada 2002 mencapai 47 persen. Menurut seorang pengamat, hilangnya satu persen jatah kuota dapat mengakibatkan 10 ribu buruh kehilangan pekerjaan.

Namun, segera harus disebutkan di sini bahwa kuota yang didapat Indonesia kerap diperjualbelikan dan acapkali jatuh ke tangan pengusaha dengan perusahaan fiktif. Pungutan liar, suap dan sederet biaya siluman dalam proses ekspor-impor kemudian menjadi faktor utama yang melemahkan daya saing TPT Indonesia.

Tentu saja industri TPT Indonesia tidak sepenuhnya habis sekarang ini. Ada perusahaan-perusahaan besar yang masih mampu bersaing karena sejak awal pasar mereka adalah negara-negara non-kuota, seperti Jepang dan Timur Tengah. Prosentase pasar ini berada pada kisaran 54 persen dari total ekspor TPT Indonesia. Pasti risiko hilangnya pasar non-kuota ini juga tinggi.

Sebetulnya, pemberlakuan sistem kuota untuk pasar TPT ke negara-negara seperti AS, Eropa yang tertuang dalam MFA (*Multi-Fiber Arrangements*) sejak 1974 dirancang untuk melindungi kepentingan negara-negara maju dari banjir TPT impor. Tujuan yang ingin mereka capai ialah memberikan perlindungan bagi industri TPT dalam negeri mereka agar dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi persaingan dengan produsen asing yang kebanyakan dari negara berkembang.

Oleh negara-negara maju dan berbagai perusahaan multinasional, MFA juga digunakan salah satunya sebagai sistem penjamin akses pasar TPT bagi negara-negara berkembang. Sebagai pembeli, perusahaan-perusahaan multinasional mengontrol para penyuplai (*supplier*, perusahaan subkontrak) di negara-negara berkembang untuk dapat memanfaatkan kuota demi keuntungan mereka yang berlipat-lipat. Ekspansi besar-besaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional kemudian mendorong dan memaksa munculnya industri-industri TPT di negara-negara yang sebetulnya tidak memiliki potensi dan basis industri TPT, seperti Indonesia.

Indonesia yang merupakan negara agrikultur telah dipaksa menjadi negara pengekspor TPT melalui pengembangan kawasan-kawasan berikat (Export Processing Zones). Potensi agrikultur negeri ini harus terbengkalai hanya demi pesona industri TPT yang selalu dibuat menjanjikan. Kini ratusan pabrik TPT bertumbangan dan ratusan ribu buruh ter-PHK. Alasan yang sering diungkapkan para pengusaha ialah bahwa mereka terkena dampak berakhirnya kuota, selain akibat penyelundupan pakaian dan mendesaknya upaya restrukturisasi industri yang membutuhkan dana 505 juta dolar AS.

Upaya pemerintah Indonesia memohon perpanjangan kuota TPT telah gagal dan kuota itu tetap dihapus awal Januari 2005 lalu. Meski demikian, industri TPT negara-negara maju seperti AS sebetulnya juga terancam TPT murah asal Cina dan berencana menyiapkan pengamanan (*safeguard*) bagi kepentingan meraka.

Sejak dulu, negara-negara maju berusaha menggunakan proteksionisme dan hambatan non-tarif lain sebagai 'tangga' mereka mencapai puncak keberhasilan industrialisasi. Kini 'tangga' itu segera mereka tendang saat banyak negara berkembang membutuhkan, dan kembali digunakan saat mereka memerlukan. Sulit untuk mengelak dari fakta bahwa kepentingan negara maju tersebut dikendalikan oleh kepentingan perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs).

Buruh sektor informal

Buruh sektor informal bukanlah fenomena baru. Buruh informal ini memiliki dimensi yang amat luas. Definisi buruh sektor informal ialah segala jenis pekerjaan di luar perlindungan negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Atau, definisi lain, ialah segala jenis pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang tetap dan tiadanya keamanan kerja (*job security*) atau tidak ada status permanen atas pekerjaan tsb. Intinya: buruh informal ialah yang bekerja di unit usaha atau lembaga yang tak berbadan hukum.

Pada 1989 angka buruh di sektor ini mencapai 75 persen dari total angkatan kerja saat itu. Belakangan pemerintah (BPS) menyebut bahwa buruh sektor informal berjumlah 70 persen dari total angkatan kerja. Tentu angka pemerintah selalu konservatif dan kemungkinan besar angka riil jauh lebih tinggi. Meski jumlah buruh informal jumlahnya amat besar, pemerintah tidak memperhatikan buruh sektor informal ini. Bantuan terhadap UKM (Usaha Kecil dan Menengah), misalnya, biasanya datang dari lembaga donor asing dan atau negara maju seperti Jepang yang tentunya mereka membatasi bantuan (utang!) mereka hanya pada UKM yang berorientasi ekspor. Pasti mereka ini menuntut kepastian ekspor UKM tersebut atas barang yang mereka inginkan.

Pada 2003 lalu, pemerintah sebetulnya mendapatkan utang dari Asian Development Bank (ADB) untuk menanggulangi masalah pengangguran. ADB telah menyetujui pinjaman senilai 85 juta dollar AS untuk mendanai proyek perluasan lapangan kerja melalui peningkatan kemampuan UKM berorientasi ekspor, melalui Bank Ekspor Indonesia dan bank umum lokal lainnya. Proyek yang berlangsung hingga akhir 2007 itu menelan dana 113 juta dolar AS. Dana sebesar itu tentu saja masuk dalam daftar utang negara. Tapi ADB juga memberi hibah sebesar 500.000 dolar AS untuk dukungan asistensi teknis bagi bank, UKM eksportir yang mendapatkan pinjaman, serta untuk studi dampak peristiwa bom Bali bagi UKM di Bali dan sekitarnya. Hibah juga datang dari JICA (Japan Internatonal Cooperation Aegency) sebesar 5 juta dolar AS (entahlah apakah dana tersebut digunakan semestinya oleh pemerintah).

Saat itu, tahun 2003, seperti diberitakan di beberapa media, pemerintah akan melakukan proyek padat karya untuk petani yang terkena dampak kekeringan di sebelas kabupaten di Jawa Tengah. Proyek padat karya yang akan menggarap berbagai proyek irigasi seperti rehabilitasi jaringan irigasi, rehabilitasi irigasi desa, dan pembuatan embung itu diperkirakan akan menelan biaya Rp 1,3 Milyar. Sedangkan program padat karya nonpetani sebesar Rp 6 miliar dilaksanakan pemerintah pada September 2003 di 40 lokasi di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Tentu ini merupakan program "hiburan" karena merupakan jaring pengaman (*safety net*) yang tak mengentaskan pengangguran. Lagipula ADB mensyaratkan bantuannya hanya untuk UKM berorientasi ekspor,

padahal pengangguran terjadi di berbagai sektor. Kebijakan ini tentu hanya akan melanggengkan pola ekstraksi oleh negara maju atas Indonesia selama ini.

Tahun 2005 lalu, ada upaya pemerintah untuk berpura-pura memperhatikan buruh informal, yakni dengan melibatkan buruh informal dalam skema jaminan sosial (jamsostek) dengan aturan pembayaran tertentu. Muncul pesimisme terhadap program pemerintah ini. Buruh informal malah akan jadi korban berikutnya, setelah buruh formal yang wajib membayar iuran tetapi layanan jamsostek terhadap mereka relatif buruk.

Biasanya, buruh formal selalu jadi korban kesewenang-wenangan pemerintah dan atau pengusaha: ada beberapa perusahaan yang taat membayarkan iuran jamsostek buruh, tetapi layanan lembaga jamsostek amat minim dan rumit, misalnya urusan administrasi yang berbelit-belit, kecilnya dana yang diterima, penyelewengan dana oleh pengusaha dan juga pejabat terkait, dll. Buruh yang terpotong jari-jari tangannya saat kerja (kecelakaan akibat kerja) hanya dapat santunan 3 juta rupiah! Bayangkan, banyak perusahaan yang menggelapkan dana iuran jamsostek buruh sehingga buruh tak mendapatkan apapun. Tak sedikit buruh jadi urung mengurus uang jamsostek yang sudah dibayarkannya.

Kecenderungan PHK yang terjadi beberapa tahun ini menunjukkan bahwa perusahaan memindahkan proses produksinya ke rumah-rumah (*home industry*) dengan upah buruh yang sangat rendah. Para buruh itu, biasanya ibu-ibu rumah tangga, tidak mendapat perlindungan, sementara hasil produk mereka diekspor ke berbagai negara maju. Isu berakhirnya kuota ekspor tekstil-garmen yang berdampak PHK ratusan ribu buruh formal juga diyakini lebih banyak dimanfaatkan para pengusaha mengganti sistem kerja seperti ini.

PHK yang menimpa puluhan atau bahkan ratusan ribu buruh baru-baru ini memang tak akan separah saat krisis 1997/98. Juga pemerintah pasti sadar bahwa tingkat informalisasi buruh dalam jumlah besar oleh perusahaan sangat negatif bagi pertumbuhan perekonomian negara. Jadi pemerintah mau tidak mau harus berupaya membuka lapangan kerja bagi para penganggur (terbuka dan terselubung) yang jumlahnya tak kurang dari 40 juta! Bicara soal peluang usaha bagi para buruh ter-PHK untuk bekerja di sektor informal sebetulnya bisa saja dicari-cari. Misalnya para mantan buruh itu berwirausaha, seperti yang terjadi pada pascakrisis 1997/98 lalu. Tapi jangan lupa bahwa perlu juga mendesak pemerintah agar memiliki skema penanggulangan terhadap para buruh yang ter-PHK ini.

Masalah lain yang harus dibenahi ialah struktur dunia usaha kita yang sangat timpang: terlalu dominannya segelintir konglomerat yang jumlahnya hanya 0,01 persen (dari 36-40 jutaan pengusaha yang ada), tetapi menguasai 60 persen aset atau sumber daya produktif nasional. Sementara sisanya yang 99,9 persen lebih adalah pengusaha skala kecil, yang hanya menguasai sekitar 40 persen dari aset nasional. Sungguh tidak adil.

Sebetulnya, tradisi yang dibangun dalam dunia usaha kita bukan membina kapasitas pengusaha menjadi kaum industrialis, tetapi cuma menjadi pedagang. Indikasinya ialah, misalnya, tidak ada kebijakan substitusi impor kapas bagi industri tekstil kita yang nyaris 100 persen bahan bakunya diimpor. Juga di sektor otomotif yang maksimal hanya melakukan perakitan atas kebanyakan komponen inti yang semuanya diimpor. Tidak ada kebijakan yang secara perlahan mendorong industri kita berkembang bukan hanya karena adanya pangsa pasar yang besar (lebih dari 227 juta penduduk) dan karena keunggulan komparatif upah buruh yang murah. Padahal, industrialisasi yang berbasis pengetahuan sudah menjadi kecenderungan, bahkan di Asia Tenggara saat ini.

Jadi, mengingat struktur usaha kita yang timpang, peluang yang bisa dimanfaatkan di bidang UKM tidaklah menjanjikan. Ditambah dengan kenyataan bahwa kredit usaha yang diberikan pemerintah kerap kali salah sasaran, diselewengkan, atau terkadang memberatkan niat usaha pengusaha kecil. Lagi, ini soal akses yang macet bagi pengusaha kecil tetapi terbuka lebar bagi segelintir pengusaha besar yang nakal. Sudah saatnya kita perlu segera membongkar struktur usaha yang tak adil tersebut. Keberadaan Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Tidak Sehat serta bertumbangannya sejumlah usaha konglomerasi pada pascakrisis 1997/98 ternyata belum mampu melahirkan kekuatan pelaku usaha baru skala menengah yang kuat.

Merujuk pada undang-undang perburuhan kita sekarang, buruh sektor informal tidak dapat mendirikan serikat buruh yang diharapkan memiliki kewenangan hukum di peradilan industrial. Undang-undang Ketenagakerjaan kita membatasi bahwa serikat buruh hanya bagi sekelompok orang yang bekerja pada satu unit usaha yang berbadan hukum dengan relasi kerja buruh-majikan (pekerja-pengusaha). Di sini sekali lagi tampak bahwa para buruh di sektor informal sama sekali tidak dilindungi negara. Mereka tidak mendapat perlindungan hukum dan politik.

Konsultasi yang dibutuhkan buruh sektor informal bisa dilakukan dengan para aktivis dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang memiliki perhatian memperkuat (empowering) mereka. Ada banyak lembaga-lembaga advokasi atau kelompok yang biasa melakukan kegiatan pembelaan terhadap mereka. Sebetulnya, problem buruh sektor informal di Indonesia ialah tidak adanya identitas politik, sementara identitas buruh di sektor formal kian lama kian terkikis dan posisi tawar mereka kian melemah. Jadi saat ini perlu terobosan bagaimana memberikan identitas politik tersebut, bahwa buruh

sektor manapun merupakan korban dari globalisasi ekonomi yang tidak adil. Dalam mencari terobosan identitas politik, perlu orientasi politik bersama. Misalnya, membangun identitas politik sebagai kaum miskin kota, warga korban penggusuran, kelompok tukang becak yang dilarang beroperasi, dll. Upaya ini harus terus diupayakan, termasuk oleh serikat buruh.

Serikat buruh sekarang ini harus sadar bahwa anggotanya terancam PHK dan kelak menjadi buruh informal, atau penganggur. Harus dipikirkan bahwa mereka tak mesti diputus hubungan keanggotaannya dalam serikat. Aliansi serikat dan upaya pengorganisasian serikat buruh juga hendaknya melibatkan buruh dan organisasi-organisasi buruh di sektor informal.

Catatan untuk Gerakan buruh

Maraknya kasus PHK, besarnya jumlah pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan direspon pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti menambah jumlah TKI di luar negeri, mendorong UKM yang berorientasi eksport, dsb. Apabila dilihat dari perspektif ekonomi, basis ekonomi Indonesia lebih didasarkan pada pihak lain (modal asing) sehingga lebih mendorong tingginya tingkat ketergantungan Indonesia dan bukan menciptakan kemandirian. Ini menjadi satu hal yang penting untuk dicermati, terutama yang berkaitan upaya mengembangkan pasar domestik. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya agar pasar domestik bisa mendukung dan menjaga kestabilan ekonomi Indonesia. Artinya, jika ekonomi Indonesia lebih stabil maka kondisi buruh akan lebih baik walaupun sulit untuk mengabaikan terjadinya eksploitasi terhadap buruh. Selain itu, mengembangkan pasar domestik juga berarti mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi alternatif yang bisa mendukung kelangsungan hidup buruh dan kelompok miskin lainnya.

Skenario penguatan kegiatan ekonomi alternatif signifikan untuk dilakukan karena ketidakstabilan kondisi ekonomi di Indonesia mengakibatkan posisi tawar buruh semakin sulit. Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan buruh juga tidak selalu mampu membendung PHK atau membuat posisi tawar buruh meningkat. Situasi tersebut menempatkan buruh dan para calon buruh dalam posisi yang serba sulit. Ketidakstabilan kondisi yang dihadapi buruh di industri formal (khususnya manufaktur) merupakan hambatan yang cukup besar bagi upaya penguatan basis di tempat kerja.

Ada beberapa catatan dalam menyikapi kecenderungan perburuhan di tahun-tahun mendatang. Terutama, saat ini buruh telah ditantang untuk kembali menunjukkan kekuatannya mengingat kebijakan-kebijakan perburuhan saat ini telah terus didorong ke arah yang sangat merugikan buruh. Beberpa undang-undang yang dianggap merugikan pengusaha dan investor akan segera direvisi.

Selain itu, masalah internal dan eksternal gerakan buruh juga tampak harus segera dibenahi. Pertama, penguatan dan perluasan basis. Maraknya kasus PHK dan semakin melemahnya basis serikat memang cukup memberatkan kerja-kerja Serikat Buruh. Namun, fakta ini harus dilawan oleh serikat dengan tetap melakukan penguatan dan perluasan basis sebisa mungkin. Jika tidak, penjinakan yang terjadi di serikat akan kian parah. Peran serikat juga hendaknya diperluas hingga pada urusan di tempat domisili di mana buruh tinggal. Advokasi yang dilakukan serikat bagi anggotanya tidak sebatas mengenai hubungan kerja, karena buruh pun memiliki persoalan sampai di lingkungan tempat tinggalnya dan berhubungan dengan masyarakatnya. Dalam artian ini, serikat mengemban kerja sebagai gerakan sosial. Peran dan orientasi serikat bukanlah sebagai organisasi runding, melainkan sebagai gerakan sosial.

Untuk itu, kedua, serikat dituntut memiliki orientasi sosial dan politik, melakukan perluasan konstituen, melakukan perubahan internal yang dinamis baik secara kualitas maupun kuantitas, dan terorganisisasi secara demokratis. Ketiga, terus dilakukannya upaya beraliansi antarserikat dan membangun *platform* bersama. Hal ini penting untuk mengikis kenyataan bahwa serikat saat ini cenderung terpecah-pecah dan sulit bekerja sama. Keempat, serikat perlu melakukan kampanye tentang kenyataan dan kondisi yang dihadapi buruh. Ini perlu dilakukan agar buruh di tingkat bawah menyadari kondisi yang kelak dihadapinya, selain agar kesadaran mereka tumbuh dan upaya sosialisasi dan pendidikan di tingkat basis juga terjadi. Kelima, perlunya pendidikan politik terhadap buruh. Buruh hendaknya terus dididik agar partisipasi mereka dalam serikat jauh lebih optimal lagi.

Politik gerakan buruh di Indonesia, seperti halnya di negeri-negeri Asia Tenggara lainnya, memang telah ditekan sedemikian rupa agar mengadopsi “keserikatburuhan ekonomi” ketimbang “keserikatburuhan politik” yang dulu hadir dalam masa-masa perlawanan atas penjajahan. Tradisi “keserikatburuhan politik” pun kini hancur dengan dampak telah terbatasnya perjuangan buruh pada kesejahteraan ekonomi yang lepas dari agenda sosial dan politik yang lebih luas. Saat ini, dalam melawan penjajahan yang tak kasat mata, amat penting bagi gerakan buruh untuk berpikir bahwa merupakan kekeliruan untuk membatasi diri mereka hanya pada visi ekonomi. Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak ekonomi dan tingkat kesejahteraan secara esensial juga merupakan sebuah perjuangan politik (Hadiz, 2004).

Memang hingga sekarang belum ada satu strategi yang mendasar yang telah ditemukan oleh serkat buruh untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi. Tetapi langkah awal yang perlu

dilakukan ialah memunculkan kembali tradisi keserikatburuhan politik dan meraih kembali ruang politik sebagai satu sasaran perjuangan buruh yang sah. Bagaimanapun, masalah pengorganisasian buruh harus direfleksikan bahwa ia juga terkait dengan upaya penyadaran politik buruh. Kesadaran politik inilah yang kelak akan mendorong buruh berpartisipasi dalam kerja-kerja serikat. Tentu menjadi tantangan yang cukup berat bagi setiap pengurus serikat buruh saat ini untuk memperbesar ruang partisipasi dan mendorong anggotanya berperan dalam kerja-kerja serikat. Yang lebih penting lagi, aliansi dan menyatunya berbagai elemen buruh dalam satu wadah perjuangan mesti terus ditingkatkan, dijalin dan tetap dipelihara. Kerja sama antarelemen buruh sangat penting bagi bangkitnya gerakan buruh yang kuat.***

Rujukan

Hadiz, Vedi R, "The Politics of Labour Movements in Southeast Asia," dalam Mark Beeson (ed.), *Contemporary Southeast Asia: Regional Dynamics, National Differences*, Basingstoke dan New York: Palgrave Macmillan, 2004. Artikel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dipublikasikan di *Jurnal Perburuhan Sedane*, edisi ini (Vol.3 No.2 2005).

Heywood, Andrew, *Politics*, London: Macmillan Press, 1997.

LIPS, "Dinamika," Semester I 2005, dalam *Jurnal Perburuhan Sedane*, Vol.3 No.2 2005.

LIPS, "Dinamika," Semester II 2004, dalam *Jurnal Perburuhan Sedane*, Vol.3 No.1 2005.

LIPS, "Dinamika," Semester I 2004, dalam *Jurnal Perburuhan Sedane*, Vol.2 No.2 2004.

LIPS, "Dinamika," Laporan Akhir Tahun 2003.

Schriffin, Anya, dan Bisat, Amer (eds.) *Covering Globalization*, New York: Columbia University Press, 2004.

"Jebakan Globalisasi dan Tantangan Pengorganisasian Buruh Saat Ini", catatan diskusi LIPS-Praxis, 13 April 2005, Jakarta.